

BAB IV

DAMPAK PEMILIHAN UMUM PERTAMA BAGI UMAT ISLAM

A. Segi Pemerintahan

Pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah negara kesatuan RI menggantikan RIS. Negara kesatuan Republik Indonesia ini mempunyai UUD yang baru yang di sebut UUDS Republik Indonesia 1950, pada masa ini pelaksanaan sistim Liberal masih berlanjut yang di dukung oleh sistim kabinet Parleментар yang terdiri dari berbagai partai politik, tetapi partai oposisi dalam kenyataannya hanya berperan untuk menjatuhkan partai yang sedang memerintah, dengan maksud agar dapat menguasai kabinet. Dimana pada awal periode ini timbul berbagai pergolakan bersenjata diantaranya RMS di Maluku, Andi Aziz di Sulawesi Selatan, DI/TII di Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Jawa tengah.⁵¹

Lewat Mosi Integral Moh. Natsir dan kawan-kawan dalam parlemen tahun 1950, negara kesatuan ini telah terbentuk dibawah payung Undang-Undang Sementara (UUDS) 1950. Menurut UUDS hidup matinya kabinet sepenuhnya di tentukan oleh besar kecilnya dukungan yang di peroleh dalam parlemen. Kedudukan presiden menurut UUDS adalah sebagai simbol yang tidak memimpin pemerintahan secara langsung, kepala pemerintah adalah

⁵¹ H. Amir Machmud, Pembangunan Politik Dalam Negeri Indonesia, PN. Gramedia, Jakarta, 1986, Hal. 196.

Perdana Menteri, jadi masa ini maju mundurnya pemerintahan tergantung dari si pemegang pemerintahan yaitu Perdana Menteri.

Sebagaimana dalam bab terdahulu, bahwa pada masa pemerintahan Liberal ini terdiri banyak partai namun secara Ideologi mereka dapat di'golongkan menjadi tiga aliran Ideologi yang memang ada sebelum perang yaitu Islam, Marxisme/Sosialisme, Nasionalisme sekuler.

Pada masa Demokrasi parlementer, Masyumi masih memainkan kartu politik yang menentukan. Demikian pula setelah kabinet Natsir jatuh pada bulan April 1951 yang kemudian di gantikan oleh Soekiman Wirjosedjojo sebagai Perdana Menteri yang kedua dalam negara kesatuan. Baik dalam kabinet Natsir maupun dalam kabinet Soekiman posisi Menteri Agama tetap di tangan K.H.Wahid Hasyim (unsur NU dalam Masyumi) tetapi pada kabinet Wilopo-Prawoto posisi Menteri Agama di serahkan pada K.H.Fakih Usman(unsur Muhamaddiyah dalam Masyumi).

Bila di hubungkan dengan kongres Muktamar NU di Palembang untuk berpisah dengan Masyumi, memang tampak ada kaitannya dengan terlepasnya posisi Menteri agama dari NU, walaupun sebab utamanya jauh lebih komplek dari itu. Seperti yang telah di bicarakan unsur NU yang tidak terwakili, sementara Masyumi mendapat 4 kursi dan PSII 1 kursi.

Dan setelah bangsa Indonesia bernaung pada UUDS dan sistim pemerintahan yang Liberal yang sering berganti kepemimpinan ini akhirnya program yang selama ini tertunda dapat di laksanakan tepatnya pada masa kabinet Boerhanuddin Harrahap yang merupakan pengganti dari kabinet Ali yang jatuh akibat peristiwa tanjung Morawa.

Demikianlah kampanye ini berlangsung begitu ramainya sekitar satu tahun. Dengan melalui persiapan selama bertahun-tahun akhirnya pada tanggal 29 September 1955 Pemilihan Umum dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dapat terlaksana secara Demokratis, pemilihan umum kali ini untuk memilih anggota DPR dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, kemudian tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilihan umum kembali untuk memilih anggota-anggota Majelis Konstituante.

Dari hasil pemilihan umum ternyata tidak memuaskan pihak manapun terutama Masyumi dan PNI, yang semula berpengharapan besar untuk menang. Begitu pula bila di tinjau dari kaca mata politik ternyata tidak satupun partai yang mendapatkan suara terbanyak mutlak, Masyumi dan PNI misalnya, hanya memperoleh masing-masing 57 kursi, dalam parlemen jumlah total 275; NU; 45, dan PKI 39 dan partai lain kurang dari 10 kursi, ini merupakan hasil pemilihan umum yang di

53
laksanakan pada tanggal 29 September 1955.

Khusus Nahdliatul Ulama' dan PKI, hasil pemilihan umum ini lebih menggembirakan, sebab kursi mereka dalam parlemen sementara hanyalah 8 dan 17. Sedangkan Masyumi merupakan partai yang sangat kecewa karena sebelumnya sebagian pemimpinnya memperkirakan bahwa pengikutnya adalah 40 juta, sedangkan jumlah seluruh suara hanyalah 43.104.464., dan 91,45% dari jumlah total itu yang memberi suara.

Kiranya pemilihan umum yang di laksanakan pada tanggal 29 September 1955 initelah berhasil, untuk selanjutnya pelaksanaan UUDS 1950 pasal 135 yang mengatur wakil rakyat yang duduk dalam konstituante. Maka pemilihan umum yang di laksanakan tanggal 15 Desember 1955 ini menghasilkan 542 wakil dari berbagai aliran yang duduk dalam konstituante.

Jumlah ini adalah dua kali jumlah DPR yang waktu hanya mendapat 272 orang dan badan ini di lantik pada tanggal 10 November 1956, adapun tugas dan wewenang konstituante seperti yang tertera dalam UUDS 1950 pasal 134 yaitu Konstituante bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS .

53
Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Hal.122.

cita Umat Islam yang telah di rintis sejak masa menjelang kemerdekaan, kini setelah Pemilihan Umum, maka dapat kita katakan bahwa cita-cita Umat Islam gagal dalam mewujudkan "Negara Islam Indonesia" itu.

B. Segi Politik

Dalam rangkaian menguraikan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam praktek pemerintahan yang sebenarnya, maka terlebih dahulu di ketengahkan sistim politik yang berlaku pada setiap Negara pada Umumnya.

Dalam sistim suatu negara akan selalu akan selalu meliputi dua suasana kehidupan, yaitu :

- a. Suasana kehidupan politik pemerintahan yang merupakan kompleks. Hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan lembaga-lembaga Negara yang ada, fungsi dan wewenang lembaga tadi serta hubungan kekuasaan antar lembaga yang satu dengan yang lain. Suasana politik pemerintahan ini pada umumnya dapat di ketahui di dalam UUD atau peraturan tertulis lainnya.
- b. Suasana kehidupan politik rakyat, yaitu kompleks hal-hal yang bersangkutan dengan pengelompokan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa di sebut sebagai kekuatan Sosial

politik dalam masyarakat, sedang intra struktur politik itu mempunyai enam unsur, yaitu:

- kelompok kepentingan
- partai politik
- tokoh politik
- Alat komunikasi politik
- kelompok penekan
- kelompok premodial

Sebagai ana telah di uraikan tentang aspek Demokrasi pancasila bahwa kehidupan politik pemerintah (organisasi pemerintah) dan suasana kehidupan politik rakyat(organisasi kekuatan-kekuatan sosial politik) hanya dapat di bedakan tetapi tidak dapat di pisahkan.⁵⁶

Sehubungan dengan uraian di atas yang termasuk dalam suasana tahun 1950-an adalah bentuk yang kedua. Pada masa UUDS ini bangsa Indonesia menganut sistim Demokrasi Liberal dengan bentuk pemerintahan parlementer yang banyak di warnai oleh banyak partai yang datang dari golongan sekuler maupun Islam, yang bermunculan di gelanggang politik pemerintahan yang berusaha mencari pengaruh yang sebesar-besarnya dalam rangkah mencari kedudukan.

Seperti kita ketahui dalam periode UUDS 1950 ini berada di antara pertama dan kedua UUD 1945. Masa ini dianggap sebagai sebab ketidak mampuan partai

kekuasaan yang dominan dalam parlemen berarti sama atau sejalan dengan peranan utama partai-partai politik tersebut.

Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa salah satu penyebab ketidak stabilan Demokrasi Liberal ini sering terjadi pergantian kabinet. Hal ini merupakan salah satu ciri khas dari sistim Demokrasi Parlemen-ter, demikianlah selama kurang lebih 9 tahun dari 7 kali kabinet silih berganti dan situasi politik pemerintahan menjadi labil, hal ini terbukti adanya kabinet yang hanya berusia 6 1/2 bulan yang terlama 2 tahun 3 bulan.⁵⁸

Adanya pemerintahan yang labil ini mengakibatkan tidak pernah adanya kesempatan kerja, yang berarti pula tidak pernah sempat di laksanakan program pemerintah, kegiatan semata-mata di bidang politik, tidak ada kesempatan melaksanakan pembangunan terutama pembangunan bidang Ekonomi. George MC.T.Kalim mengemukakan :

Masa 1950-1957(masa berlekunya UUDS'1950) merupakan kegagalan Demokrasi Parlemonter. Ia melihat sebenarnya praktek kehidupan politik pada masa itu bukanlah suatu foto copy dari sistim Barat, juga bukan sensitif dari sistim Barat dengan unsur-unsur tradisional, hal ini berarti belum di temukan sistim politik yang mantap.

⁵⁸ H.Alamsyah, Op Cit, Hal.142.

1. Umat Islam masih belum memiliki kepemimpinan yang dapat di andalkan, inilah salah satu sebab mengapa persatuan masih sering goyah.
2. Sebagai konsekwensi logis dari faktor pertama, maka pemimpin-pemimpin Umat sering benar membuat keputusan-keputusan politik tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak masa depannya bagi Umat secara keseluruhan.⁶⁰

Dengan pemilihan Umum 1955 ini, Umat Islam masih tetap terbelah lagi, walaupun semua tidak menyukainya. Pada tahun 1953 perpecahan itu benar-benar kelihatan, ketika panitia pemilihan umum tidak mengikut sertakan Masyumi sebagai unsur anggota PPI oleh kabinet Ali I : NU , PSII dan PERTI yang ikut di dalamnya tidak memprotes sama sekali, padahal panitia seperti ini sebenarnya mencakup unsur-unsur yang bersifat luas, tampak sikap mereka asal diri tidak kena hal ini tercermin dengan sikapnya yang tak acuh, padahal PPI bertugas mempersiapkan Pemilihan Umum yang di ketuahi oleh Hadikusumo dari PNI.

Masyumi memang berpendapat bahwa kepentingan bersama dalam mengatasi kepentingan golongan. Hal ini Masyumi mengajukan protes dan Soekiman juga mengajukan himbauan kepada presiden tentang itu, sebagaimana di Jakarta kedudukan Masyumi dalam ketiga panitia pemilihan daerah berkurang kekuatannya dan setelah wali kota yang baru di angkat dari golongan PNI yang membubarkan panitia , tempat wakil Masyumi hanya seorang yang duduk dalam ketiga badan itu dan dari itulah...

⁶⁰ Syafi'i Ma'arif, Op Cit, Hal.120.

tampak bahwa Masyumi dalam panitia daerah juga di-
késampingkan.

Akhirnya apapun Interpretasi yang di berikan
orang dalam membaca kompleksitas hubungan antara dua
kelompok besar Umat Islam di Indonesia yang merupakan
kunci persatuan. Yang pasti bahwa Umat Islam
secara keseluruhan turut dalam pemilihan Umum perta-
ma yang di laksanakan pada tahun 1955 ini dengan ke-
kuatan yang terpecah belah.

Dari uraian yang ada, maka dapat kita ambil
suatu hikamah bagi Umat Islam pada masa yang akan da-
tang. Di mana Umat Islam pada saat itu tahun 1955 ini
terpecahnya hanyalah terbatas pada soal kedudukan be-
laka oleh sebab itu kiranya dari segi sosial Umat
Islam itu di pecah-pecah hanya dengan cara yang mudah
oleh golongan lain yaitu dengan pemberian kedudukan
yang labih dari kedudukan yang di berikan dari partai
Umat Islam sendiri.